

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya sangat cepat terus berkembang pesat seiring berjalannya waktu dapat dikatakan banyak potensi-potensi usaha baru yang timbul dalam perekonomian indonesia namun untuk mengembangkan potensi tersebut tentulah aspek pendanaan sangat dibutuhkan dan saat ini semakin banyak orang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak dibidang penyediaan dana ataupun barang yang nantinya akan dipergunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen juga dapat dikatakan sebagai korporasi karena masuk kedalam perusahaan kecil yang berbadan hukum.

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan oleh suatu Lembaga Keuangan Non Bank untuk jangka waktu tertentu yang dimana sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang masalah ini masih dalam keputusan menteri keuangan dan peraturan peraturannya maka dari itu tanpa kita sadari dengan maraknya perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen yang semakin bermunculan memiliki peluang besar dalam melakukan

tindak pidana penggelapan dimana penggelapan termasuk kedalam tindakan pidana yang melawan hukum. salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penggelapan, dengan seiring majunya jaman serta tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara singkat yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Penggelapan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum , dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang yang berbunyi maka barangsiapa yang melanggar larangan tersebut para pelaku tindak pidana dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut atau yang berhubungan erat.¹

Secara umum tindak pidana penggelapan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila dilihat dari ada atau tidaknya kesalahan pada tersangka/terdakwa penggelapan jika dipenuhi unsur-unsur:

- a. Barang siapa (ada pelaku)
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum
- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- d. Barang tersebut ada karena dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan²

Yang mana dalam kasus tersebut berada dalam kekuasaan perusahaan pembiayaan konsumen atau kreditur bukan karena suatu kejahatan akan tetapi karena BPKB tersebut memang digunakan oleh debitur sebagai jaminan dengan demikian tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang dapat

¹ Andi Hamza. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. Hal 15

² Moeljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Hal. 164

dipertanggungjawabkan oleh pelaku penggelapan karena memenuhi unsur-unsur tersebut.

Perusahaan pembiayaan konsumen atau kreditur tidak mempunyai hak dalam menjaminkan barang milik debitur kepada pihak ketiga ataupun orang lain. Dan kreditur tersebut dapat dijerat pidana hanya karena melakukan suatu tindak pidana penggelapan. Akan tetapi beda hal nya apabila jaminan yang debitur berikan kemudian berpindah kepada kreditur baru karena terjadi subrogasi maka jaminan debitur bisa berada pada pihak lain yang dimana jaminan debitur hanya bisa berada pada pihak lain apabila kreditur mengalihkan piutangnya kepada orang lain atau kreditur baru.

Di indonesia pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan hal baru bagi hukum pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini membedakan korporasi dalam arti sempit dan arti luas dilihat dari bentuk hukumnya yaitu:

“Suatu korporasi dikatakan dalam arti sempit jika ia merupakan badan hukum, disebut dalam arti luas jika ia meliputi korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum³. dalam tindak pidana korporasi, sering perhatian ditujukan pada perilaku perusahaan yang melawan hukum (*illegal corporate behaviour*).”⁴

Tetapi tidak ditujukan pada “*small scale business*” atau bisnis berskala kecil seperti toko, warung yang berada di lingkungan pemukiman sehingga batasan tindak pidana korporasi kadang-kadang melampaui batasan dalam hukum pidana, tetapi fokusnya tidak pada *small scale business*. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilihat dari diundangkannya UUPK

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, h.43.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. (Kumpulan Karangan Buku Kesatu), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1995, Cet. Ke-1). Hal 66-67

(Undang-Undang Perlindungan Konsumen) kemudian diwujudkan dengan salah satu peran hukum pidana dengan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*).

Pada dasarnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih selalu dikaitkan dengan orang atau pribadi yang memang melakukan kesalahan. “Sesuai dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas kesalahan; *nulla poena sine culpa, geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld, actus non facit reum, nisi mens sit rea*)”.⁵ Pertanggungjawaban pidana dapat di minta pertanggungjawabannya jika orang tersebut benar-benar melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan.

Dalam salah satu kasus yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen di kota malang dimana perusahaan pembiayaan konsumen tersebut melakukan penggelapan terhadap debitur dengan melakukan perbuatan yang merugikan pihak debitur antara lain pihak debitur dan pihak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan kronologi sebagai berikut awal mula pihak debitur dan pihak perusahaan pembiayaan konsumen terikat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen dimana debitur membeli sebuah kendaraan bermotor yaitu mobil yang kemudian dibiayai oleh leasing dengan cara dibayar lunas terlebih dahulu kepada pihak dealer oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang kemudian pihak debitur berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rajawali. Jakarta. Hal153

bersama dalam perjanjian, jaminan dari perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) milik debitur. lalu tanpa sepengetahuan debitur perusahaan pembiayaan konsumen menjaminkan kembali BPKB milik debitur kepada pihak ketiga sebagai jaminan hutangnya (perbuatan melawan hukum) kemudian setelah debitur melunasi hutangnya dengan tepat waktu debitur tidak dapat memperoleh BPKBnya kembali sehingga membuat pihak debitur dirugikan karena debitur sudah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang namun tidak dapat mengambil BPKBnya kembali yang telah diberikan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat dikatakan sebagai penipuan. Perbuatan melawan hukum seperti kasus diatas tidak hanya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen cabang malang tetapi dilakukan juga oleh cabang-cabang perusahaan leasing di seluruh indonesia.

Berdasarkan perbuatan melawan hukum tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen ini adapun dasar-dasar hukumnya sebagai berikut pasal 372 KUHP tentang pidana penggelapan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” .⁶

⁶ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kemudian mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana, Serta Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan”.⁷ dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 18.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti dan menganalisa dari segi hukum pidana bagaimana “ANALISA YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP DEBITUR”.

B. Rumusan Masalah

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah saya paparkan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan penggelapan terhadap debitur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan pembiayaan konsumen terhadap debitur yang dirugikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia ?



C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan diatas, maka penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap debitur (kredit mobil) menurut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan pembiayaan konsumen terhadap debitur yang dirugikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diindonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dari penelitian skripsi ini yaitu :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen terhadap debitur.
2. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap debitur.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat lebih tegas dalam melindungi rakyatnya serta dapat disumbangkan kepada para pihak yaitu:

a. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam melindungi rakyatnya serta dapat membuat peraturan kebijakan-kebijakan yang lebih fokus tentang tindak pidana penipuan.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya agar tercapai ketertiban dan ketidaknyamanan didalam kehidupan masyarakat.

c. Masyarakat

Memperoleh informasi tentang pentingnya mengetahui peraturan perundang-undangan dan saling peduli terhadap sesama serta menanamkan moral kepada generasi penerus bangsa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder.⁸

Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kaulitatif.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Serta pendekatan kaulitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran.

3 .Sumber Hukum

- a. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat.

Yaitu bahan hukum yang mengikat :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Dyah Ochtorina.A'an Efendi.*Penelitian Hukum (legal Research)*. Sinar Grafika.Jakarta.2014.Hal20

⁹ Peter Mahmud Marzuki.*Penelitian Hukum*.Kencana Prenada Media Group.Jakarta.2011.Hal.93

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 387 dan Pasal 59.

3) Undang-Undang Perseroan Terbatas

b. Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang.

c. Penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi, komentar undang-undang, putusan pengadilan dan lain sebagainya.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Besar Bahasa Inggris

e. Metode Pengumpulan data

Dilakukan melalui studi kepustakaan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

f. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif menggunakan analisis kualitatif. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode antara lain:

- 1) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
- 2) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada undang-undang hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi atau tugas akhir sangat diperlukan suatu sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menulis dan memudahkan pembaca untuk mengerti, untuk memahami isi dari tugas akhir ini.

Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan, maka penulisan ini akan dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rujukan/tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap debitur (kredit mobil).

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian melalui metode normatif, yang diuraikan masing-masing permasalahan menjadi sub bab menjadi bahasan tersendiri serta berkenaan pada permasalahan berdasarkan pada teori atau kajian pustaka disertai pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan

pembiayaan konsumen yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap debitur (kredit mobil).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran akan membahas mengenai hasil analisis penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan sebelumnya secara singkat, jelas dan padat.

